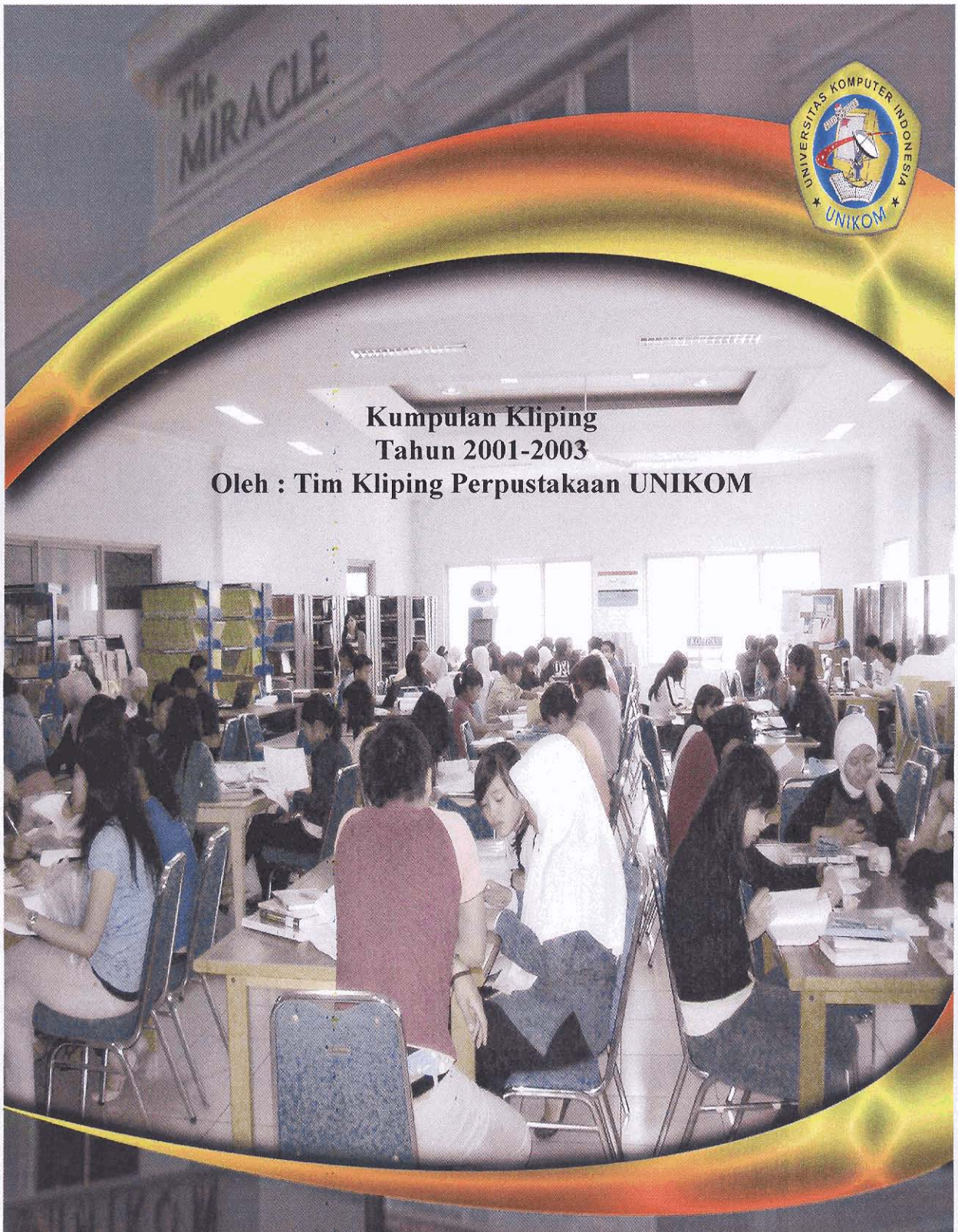


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 14 / 4-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : P45AK / 336.2

Dirjen Pajak Hadi Purnomo:

Pajak Bukan Pemicu Larinya Investor

JAKARTA, KOMPAS — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membenarkan, penyebab utama hengkangnya investor Jepang dan investor lain dari Indonesia adalah ketentuan perpajakan yang saling tumpang tindih dan sangat memberatkan, sebagaimana diungkapkan oleh Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang. Pajak yang dikeluhkan investor itu di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh).

"Hasil Tim Kerja itu memang benar. Pajak kita itu sangat kacau dan besar sekali kewajibannya bagi wajib pajak. Itulah yang membuat investor berpikir keras untuk memilih keluar dari sini, sebelum adanya perbaikan," ujar seorang pejabat tinggi BKPM yang tak mau disebutkan namanya, Kamis (15/8).

"Harusnya, pada situasi ekonomi seperti sekarang ini, wajib pajak jangan dieksploitasi, tetapi dikenai saja sesuai kewajibannya. Karena, bagaimana mereka harus membayar pajak sebesar-besarnya sementara perekonomian masih belum pulih," tambah pejabat tersebut.

Sebaliknya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) Hadi Purnomo yang dimintai komentarnya secara terpisah membantah ketentuan pajak sebagai pemicu larinya investor.

Bahkan, ia balik bertanya ketentuan perpajakan yang mana saja yang menjadi penyebab larinya investor Jepang dan investor lainnya. Meskipun demikian, ia tak menampik masih adanya sejumlah ketentuan perpajakan, seperti pajak di daerah, yang merugikan kepentingan penanaman modal di daerah.

Namun, pihaknya mengaku tak dapat berbuat apa-apa dengan ketentuan perpajakan seperti itu, mengingat ketentuan seperti itu bukan tanggung jawab Dirjen Pajak, melainkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Hasil inventarisasi Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang menyebut sejumlah ketentuan perpajakan sebagai faktor utama penyebab hengkangnya investor, disusul faktor lain seperti masalah tenaga kerja, penegakan hukum, dan faktor keamanan. (*Kompas*, 14/8)

"Tidak ada aturan pajak yang menjadi penyebab larinya investor. Kalau memang ada, coba tunjukkan yang mana aturan pajak tersebut. Jadi, larinya investor tersebut bukan karena pajak, akan tetapi faktor lain," ujar Hadi.

"Tugas Ditjen Pajak itu hanya mengumpulkan pajak dari empat jenis pajak yang ada, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jadi, ketentuan pajak apa yang disebutkan itu?" tambah Hadi lagi.

"Tax holiday"

Menurut pejabat BKPM, ekstensifikasi ataupun intensifikasi boleh-boleh saja dilakukan untuk mengejar penerimaan pendapatan pajak dan penerimaan negara. Meskipun demikian, juga harus diperhitungkan kemampuan investor yang sudah menanamkan modalnya, termasuk untuk pembayaran gaji tenaga kerja dan ongkos-ongkos lain yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Menyangkut fasilitas *tax holiday* bagi investor yang menanamkan modalnya, pejabat itu menyatakan seharusnya Ditjen Pajak mengakomodasinya untuk mengimbangi ketentuan perpajakan yang memberatkan pengusaha. Sebab, ketentuan *tax holiday* merupakan insentif yang juga diberikan oleh negara-negara tetangga Indonesia di kawasan Asia.

Sebaliknya Hadi mengatakan, meskipun Indonesia tidak menerapkan *tax holiday*, sebagian insentif pengganti sudah diakomodasikan Ditjen Pajak dalam bentuk lain, yaitu penghapusan dipercepat, *investment allowance* dan kompensasi kerugian. "Dengan adanya insentif pengganti, sebenarnya tidak ada alasan pajak dinilai sebagai penghambat investasi," ujarnya.

Sejak tahun 1999, investasi Jepang di Indonesia anjlok sampai 70 persen akibat gejolak politik dan terganggunya stabilitas yang terkait dengan pergantian kekuasaan.

Dari hasil survei yang dilakukan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pertengahan 2001, dari 401 perusahaan Jepang yang akan berinvestasi di luar negaranya dalam tiga tahun mendatang, hanya 56 perusahaan yang memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Sebanyak 327 perusahaan lainnya memilih Cina dan Thailand.

Survei JBIC juga menunjukkan, nilai investasi langsung ke Indonesia dalam empat tahun terakhir cenderung menurun tajam. Nilai investasi Jepang tahun 1998 adalah 1,331 milyar dollar AS, tetapi tahun 1999 anjlok separuhnya menjadi 640 juta dollar AS. Tahun 2000, nilainya kembali meningkat tiga kali lipat menjadi 1,954 milyar dollar AS, tetapi tahun 2001 investasi itu kembali anjlok lebih dari separuhnya menjadi 762 juta dollar AS. (HAR)

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : SENIN / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : A / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : KERAF, A Sonny
Judul Artikel/ Berita : UTANG Luar Negeri, Perlu Terobosan Baru
SUBJEK / NO CLASS : UTANG DAN PIUTANG NEGARA / 336.3

Utang Luar Negeri, Perlu Terobosan Baru

PENANDATANGANAN LoI 27 Agustus 2001 antara Pemerintah Indonesia dan IMF menimbulkan dua reaksi berbeda. Bagi yang percaya bahwa utang luar negeri adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan ekonomi Indonesia dan untuk meneruskan pembangunan ekonomi kita, peristiwa itu disambut gembira. Peristiwa itu juga dibaca sebagai tanda kepercayaan lembaga kreditor terhadap pemerintah dan bangsa kita.

Di pihak lain, peristiwa itu justru dilihat sebagai terbukanya kembali peluang baru menuju kemerosotan ekonomi dan moral. Pasalnya, pemberian pinjaman baru dengan cara-cara dan pola pemanfaatan yang tidak banyak berubah akan membawa kita pada situasi yang juga tidak banyak berubah. Kita bagaikan sedang tenggelam di pusaran air yang deras, ditolong orang-orang yang sama dengan pola dan cara penyelamatan yang sama sehingga kita makin terperosok ke dalam pusaran arus deras yang sama, yang pada akhirnya mungkin tidak akan tertolong sama sekali.

Korupsi baru

Kendati dana pinjaman 400 juta dollar AS yang segera cair usai penandatanganan LoI itu hanya akan dipakai sebagai cadangan devisa, kiranya kita perlu mencari terobosan baru tentang utang Indonesia selagi pemerintahan Megawati baru terbentuk. Kita perlu mencari pola dan cara baru pemberian dan pemanfaatan utang, agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pemanfaatan utang di masa lalu.

Ini penting, karena selama pola pemberian pinjaman, cara pemanfaatan pinjaman dan sikap lembaga kreditor dan birokrasi yang memanfaatkan pinjaman itu tetap sama, berapa pun jumlah pinjaman yang diberikan kepada kita, kita tetap akan terus terperosok dililit utang yang tak bisa terbayarkan. Selama semua itu tidak berubah, utang baru tidak akan banyak menolong bangsa ini. Utang baru justru menimbulkan korupsi baru, karena selama pola, cara pemberian, dan pemanfaatan pinjaman itu tetap sama, maka sebagian utang itu akan dimakan secara tidak bertanggung jawab baik oleh pengelola utang di pihak kita maupun—dalam kasus tertentu—lembaga kreditor sendiri. Dan korupsi baru berarti beban baru pembayaran utang oleh rakyat yang tidak berdosa, yang mungkin tidak ikut menikmati utang itu.

Dalam hal ini diperlukan beberapa kesepakatan baru yang menjadi pegangan bersama, khususnya antara Pemerintah Indonesia dan lembaga kreditor (dibedakan dari lembaga donor yang memberi hibah cuma-cuma) dalam pemberian dan pemanfaatan pinjaman dari luar negeri. Pertama, pinjaman itu adalah utang rakyat Indonesia, yang akan dikembalikan dengan uang rakyat Indonesia. Singkatnya, kendati uang itu berasal dari lembaga kreditor, itu adalah uang rakyat Indonesia.

Kedua, karena utang itu adalah uang rakyat Indonesia, intervensi yang berlebihan dari lembaga kreditor harus dibatasi, bahkan diakhiri. Ini penting agar lembaga kreditor tidak terlalu jauh mengintervensi kita dalam pemanfaatan dana pinjaman itu. Kendati intervensi itu bertujuan baik, katakan saja demi menjamin dana tersebut digunakan secara baik, itu pun harus atas batas-batas yang wajar dan *fair*. Apalagi, kalau intervensi itu ternyata mempunyai dampak-dampak negatif tertentu.

Intervensi yang kaku justru membuat Pemerintah Indonesia terpaksa memenuhi beberapa persyaratan pinjaman secara terburu-buru sekadar mengejar hasil sesuai batas waktu tanpa memperhatikan proses dan kualitas hasil. Ini buruk, karena dalam banyak kasus (misalnya, UU No 22 Tahun 1999) kita terpaksa melakukan banyak pembenahan di kemudian hari yang justru memakan biaya dan energi. Bahkan ketika itu terjadi, lembaga kreditor tidak mau ikut tanggung jawab.

Intervensi harus diakhiri. Pengalaman menunjukkan, intervensi yang bertujuan untuk menghindari KKN, justru sebaliknya malah memupuk KKN, entah disengaja atau tidak. Bahkan dalam kasus tertentu sebagaimana pernah saya tangani, KKN itu dilakukan secara sadar oleh pihak pemberi pinjaman, khususnya dalam hal penggunaan teknologi untuk proyek yang didanai pinjaman luar negeri itu.

Justru karena pemberi pinjaman diperbolehkan ikut campur tangan menangani proyek pinjaman itu, mereka mendesak pihak Indonesia untuk harus membeli teknologi dari negaranya. Di sini terlihat jelas tidak *fair*-nya cara pemanfaatan pinjaman tadi. Uang rakyat Indonesia ternyata kembali lagi ke kantung pemberi pinjaman. Bahkan kita dibuat tidak berdaya, karena bila hal itu ditolak, pinjaman akan dibatalkan.

Yang lebih buruk lagi, teknologi tadi digelembungkan harganya secara sadar (ini kasus nyata yang pernah saya bereskan) jauh lebih mahal dari alternatifnya, baik alternatif dari negara lain maupun dari dalam negeri.

Ketiga, harus ada kesepakatan baru bahwa lembaga kreditor boleh saja menyertakan konsultannya dalam penanganan proyek pinjaman luar negeri. Tetapi, konsultan itu dibayar dengan dana dari bunga pinjaman, atau dana kreditor sendiri, bukan dari pinjaman pokok. Ini amat penting, karena kenyataan menunjukkan, sebagian dana pinjaman ternyata kembali ke kantong lembaga kreditor dalam bentuk *fee* tenaga konsultan. Padahal, konsultan itu bekerja terutama untuk kepentingan lembaga kreditor, bahkan dengan beban pekerjaan yang tidak seberapa dibanding beban pekerjaan tenaga orang Indonesia sendiri. Ironisnya, konsultan asing tadi dibayar Rp 150 juta, sementara pimpinan proyek orang Indonesia cuma dibayar Rp 150.000, sebuah perbedaan yang tidak manusiawi, tidak *fair*, karena yang bekerja mati-matian justru pimpinan proyek tadi. Apalagi dana itu adalah uang rakyat Indonesia. (Jangan-jangan karena itulah dana pinjaman diselewengkan diam-diam oleh orang kita sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan ini).

Keempat, secara internal Pemerintah Indonesia, perlu ada kesepakatan khusus tentang pemanfaatan utang luar negeri secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena kenyataannya dana itu adalah uang rakyat. Selama mental kita belum berubah dan menganggap pinjaman sebagai dana segar dan dipakai untuk apa saja yang bisa "diproyekkan"—tanpa memperhatikan manfaat yang nyata untuk rakyat—utang baru tidak membawa dampak pemulihan ekonomi sama sekali. Selama mental birokrat kita adalah mumpung saya lagi berkuasa dan mumpung ada yang menawarkan pinjaman, lalu dicari-carikan proyek untuk sekadar didanai dengan pinjaman tadi, kita tetap akan terpuruk secara ekonomi dan moral. Apalagi bila disertai sikap "proyek pinjaman berarti ada dana untuk kantong sendiri."

Dan itu berarti, makin besar pinjaman bukannya makin besar peluang untuk memulihkan ekonomi, justru sebaliknya, makin besar peluang untuk makin hancur.

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

Perlu terobosan baru

Selama beberapa kesepakatan dasar itu dan kesepakatan teknis moneter lainnya tidak dilakukan, pinjaman baru hanya akan melanggengkan dua hal. Pertama, utang dan pinjaman baru hanya akan melanggengkan korupsi baik di pihak birokrat maupun—dalam kasus tertentu—pihak lembaga kreditornya. Kedua, sebagian besar utang itu akan tetap kembali ke lembaga kreditor, khususnya untuk *fee* tenaga konsultan asing. Artinya, negara miskin seperti Indonesia justru memberi makan lembaga dan negara kaya yang memberi pinjaman.

Bila ini benar terjadi, kita akan tetap berada dalam krisis terus berapa pun banyak pinjaman yang kita terima. Bahkan pinjaman itu bukannya menyelamatkan, justru sebaliknya membuat kita semakin terpuruk karena pinjaman itu tidak seluruhnya dipakai untuk kepentingan rakyat kita.

Mengingat pemerintahan sekarang baru terbentuk, ada baiknya pemerintah ini melakukan terobosan untuk membuat utang luar negeri kita membawa kemaslahatan bagi rakyat, bukan membawa kehancuran. Saya pernah mengajukan hal ini dalam Rakor Perekonomian pada beberapa bulan sebelumnya. Tetapi, situasi politik waktu itu yang diwarnai ketegangan antara DPR dan Presiden tidak memungkinkan pemerintah mengambil terobosan baru untuk itu.

Termasuk dalam terobosan itu adalah kebijakan "membangun tanpa utang." Kendati tidak realistis untuk situasi sekarang, kebijakan ini bisa menjadi agenda jangka panjang. Paling kurang, selama saya menjadi pejabat pemerintah, kebijakan ini telah saya terapkan karena sejak awal saya telah menggariskan tidak membuat komitmen baru untuk menerima pijaman luar negeri, kecuali karena terpaksa menyelesaikan komitmen yang telah dibuat pemerintah sebelumnya, selain memanfaatkan dana hibah di bidang lingkungan.

◆ **A Sonny Keraf**, *staf Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 48 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : NARA, NASRULLAH.
Subjek / NO · CLASS : PARAWISATA / 338·4

Wisata Pantai Selatan Yogyakarta

Antara Mitos Ratu Kidul dan Harmoni bersama Nelayan

SETIAP kali mendengar istilah wisata pantai, asosiasi orang langsung tertuju pada hamparan pasir putih yang pada bagian tepi senantiasa basah terjilat ombak. Mungkin juga terbayang, beberapa orang meliuk-liukkan badan memainkan papan selancar di atas gelombang. Pada saat yang sama, sejumlah pengunjung yang berpakaian minim bermalas-malasan sambil rebahan menatap ke laut. Terdengar pula riuh rendah suara anak kecil bercengkerama di bibir pantai.

AKAN tetapi, untuk obyek-obyek wisata pantai selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bayangan seperti itu tampaknya harus disingkirkan jauh-jauh. Maklum, sebagai pantai yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, ombak lautnya kurang begitu ramah.

Di pesisir selatan Yogyakarta, terdapat sekitar 13 obyek pantai yang memiliki pesona wisata. Semuanya membentang sepanjang 110 kilometer dari barat ke timur. Mulai dari Pantai Congot, Glagah, Trisik di Kabupaten Kulon Progo; kemudian Pantai Pandansimo, Samas, Parangkusumo, Parangtritis (Kabupaten Bantul); hingga Pantai Parang Endog, Baron, Kukup, Krakal, Wedi Ombo, dan Ngungap (Gunung Kidul).

Dari Kota Yogyakarta, obyek-obyek wisata pantai itu bisa dijangkau dengan kendaraan darat dengan jarak tempuh antara 30-60 kilometer.

Dari 13 obyek pantai di atas, hanya Parangtritis (Kabupaten Bantul) dan Pantai Baron (Kabupaten Gunung Kidul) yang terbilang landai dan bersahabat untuk bersantai-ria. Obyek wisata pantai lainnya rata-rata diwarnai tebing pasir yang curam, akibat hempasan gelombang laut dan tarikan arus bawah. Itu sebabnya, Pantai Parangtritis selalu menempati peringkat teratas dalam angka kunjungan wisata, dibanding pantai-pantai lainnya. **(lihat tabel)**

Pada musim kemarau, suasana pantai-pantai itu terkesan kian angker. Angin bertiup kencang, seperti tak mau kalah dengan deburan ombak. Jangankan topi, payung pun kerap lepas dari pegangan sebelum diterbangkan angin. Embusan angin menyingkap butir-butir pasir halus lantas beterbangan ke arah daratan. Agar mata tidak sampai tertimpa buliran pasir halus, pengunjung harus terus memakai kaca mata. Belum lagi udara panas dari terik matahari.

Gulungan ombak yang rata-rata setinggi 2-3 meter memecah di pantai dengan dahsyat, melahirkan suara berdebur bersahut-sahutan. Selanjutnya, pecahan gelombang yang kembali ke tengah samudera menyeret pasir dan benda-benda apa saja yang ditemuinya.

Apabila ada yang berani melayani keganasan ombak, maut risikonya. Hampir setiap bulan terdengar kabar ada pengunjung pantai selatan hilang terseret gelombang. Anehnya, jenazah pengunjung yang nahas itu, menghilang bagaikan ditelan bumi.

Tim SAR rata-rata baru bisa menemukan jenazahnya 2-3 hari kemudian setelah melakukan penyisiran. Biasanya, lokasi penemuan mayat tidak pada area di mana pengunjung tersebut tertelan ombak. Mayat ditemukan ratusan meter, bahkan kadang beberapa kilometer dari lokasi semula.

Di kalangan masyarakat setempat, kejadian misterius semacam itu, semakin menguatkan mitos bahwa penguasa laut yang lazim disebut Nyi Roro Kidul (Ratu Pantai Selatan), suka "melenyapkan" orang yang tidak mengindahkan kaidah alam.

Dari sisi ilmiah, kejadian semacam itu makin menguatkan teori bahwa palung laut selatan Jawa memang sarat arus bawah yang terus bergerak. Benda apa saja yang terseret ombak dari bibir pantai, terseret ke bawah dan terdampar pada lokasi berbeda.

Mengingat banyaknya korban yang telah tertelan oleh ombak Laut Selatan, maka pengelola obyek-obyek wisata setempat memasang papan pengumuman "Dilarang Berenang" di beberapa lokasi. Begitu pun, papan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

peringatan itu kerap dilanggar oleh para pengunjung, sehingga musibah terus saja berulang.

◆◆◆

LANTAS, apa yang menarik dari obyek-obyek wisata Pantai Selatan Yogyakarta?

Di balik keganasan ombaknya, pantai selatan justru menjanjikan kedamaian yang rasanya makin sulit ditemukan di tengah derasnya semangat materialisme dewasa ini. Setidaknya itu kita rasakan saat menyelami kehidupan masyarakat nelayan setempat. Pesona yang dirasakan lebih bernuansa sosial-budaya ketimbang aspek keindahan alamnya. Dengan keterbatasan infrastruktur, para nelayan di sepanjang pantai selatan Jawa ini nyaris tak pernah mengeluh.

Tuhan seperti menciptakan pantai-pantai selatan di Yogyakarta, kecuali Pantai Parangtritis, lebih harmoni untuk kehidupan nelayan. Anda yang sudah terlalu jenuh dengan hingar-bingar kehidupan kota, mungkin bisa mengendurkan urat syaraf dengan mengunjungi tempat-tempat ini.

Di Pantai Trisik dan Pandansimo, misalnya, tidak jauh dari rumah-rumah nelayan yang terbuat dari bambu dan gedek, terdapat tempat pelelangan ikan.

Para pengunjung dari berbagai lapisan sosial, bisa menyaksikan dari dekat bagaimana ikan hasil tangkapan diturunkan dari perahu, kemudian ditawarkan kepada pengunjung. Pembelinya tak lain dari pengunjung tempat wisata itu. Mereka berbaur dengan pedagang dari pasar rakyat sekitarnya.

Sepanjang pagi hingga siang hari, silih berganti perahu nelayan membongkar ikan hasil tangkapannya. Menggunakan perahu *mini fiber* dengan mesin berkekuatan 5-12 tenaga kuda, nelayan mampu menangkap beragam jenis ikan. Seperti, kerapu, bawal, salam, tongkol, pari, cerucut, dan lele laut. Pada musim tertentu, kepiting dan udang juga ditemukan membaur dengan hasil tangkapan lainnya.

Setiap kali kuli memuntahkan ikan hasil tangkapan dari bakul ke lantai pelelangan, setiap itu pula juru taksir merubung bersama pengunjung. Setelah terjadi negosiasi antara pemilik hasil tangkapan, terdengarlah penawaran harga dari mulut juru lelang.

"*Pitu limo* (tujuh puluh lima—**Red**)...!" teriak Sugito (30-an), seorang juru lelang seraya menawarkan tumpukan lima kilogram ikan bawal. Matanya kemudian menyapu semua wajah pengunjung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Trisik. Jika penawaran pertama langsung disambut reaksi pengunjung dengan mengacungkan tangan, maka harga pada penawaran selanjutnya bisa naik Rp 5.000 - Rp 10.000. Sebaliknya, jika penawaran pertama tak ada yang menggubris, penawaran selanjutnya bisa turun hingga separuhnya.

Para pengunjung pantai, tentu bukan membeli ikan untuk dijual kembali di pasar. Mereka membeli untuk disantap di tempat itu juga setelah dibakar atau digoreng. Para istri maupun anak-anak nelayan dengan sigap menawarkan jasa pengolahan, termasuk menyediakan nasi, sambel, lalapan, dan kecapnya.

Di sisi timur bangunan TPI, terdapat gubuk-gubuk tempat pengolahan ikan. Di dalamnya, tersedia arang untuk memanggang ikan, maupun anglo, dan panci penggorengan. Untuk ikan yang beratnya satu kilogram, dikenakan ongkos menggoreng Rp 2.000 ditambah harga nasi Rp 1.000 per piring.

Ikan yang sudah matang diantar ke sebuah gubuk lain, di depan pelataran parkir. Di situ sudah tersedia nasi hangat berikut sambalnya. Selanjutnya, di bawah embusan angin pantai, pengunjung tinggal melahap ikan hasil olahan sesuai pesanannya.

Itu sebagian kenikmatan di tengah denyut nadi kehidupan nelayan di Pantai Trisik, Pandansimo, Baron, atau Krakal, misalnya. Cukup dengan membayar tiket tanda masuk yang rata-rata di bawah Rp 2.000 per kepala, pengunjung bisa merasakan denyut nadi kehidupan nelayan yang penuh kesederhanaan.

◆◆◆

KEPERCAYAAN masyarakat setempat tentang legenda Nyi Roro Kidul juga dengan sendirinya melahirkan pesona tersendiri. Hampir setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, nelayan setempat melakukan upacara ritual di pantai-pantai tersebut. Acara ritual diwarnai pelarungan sesajen dan kembang warna-warni ke laut. Puncak acara ritual biasanya terjadi pada malam 1 Suro, dan dua-tiga hari setelah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya, nelayan meminta keselamatan dan kemurahan rezeki dari penguasa bumi dan langit.

Bila merasa belum puas menyelami kehidupan nelayan, pengunjung masih lebih dekat lagi dengan geliat mereka dengan cara ikut melaut bersamanya. Nelayan mempersilakan tamu datang subuh-subuh atau sekalian menginap bila berminat. Nelayan Pandansimo misalnya, menawarkan rumahnya untuk ditempati menginap.

"Asal tahan godaan saja," ujar Wagiono (40-an), seorang nelayan yang bermukim di kawasan wisata Pandansimo.

Godaan yang dimaksud adalah para wanita penghibur yang *mangkal* siang-malam di warung-warung penduduk. Penuturan Wagiono itu mengungkapkan kepolosan *wong cilik* terhadap gejala sosial di sekitarnya. Sikap itu bertolak belakang dengan retorika pejabat pemerintah setempat yang cenderung menutup-nutupi sisi buram obyek wisata di daerahnya.

Maraknya prostitusi di pantai-pantai selatan sejak krisis moneter tahun 1998, tentu merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat. Pekerjaan rumah lainnya yang tak kalah pentingnya adalah penyediaan penginapan yang representatif. Tidak perlu mewah, yang penting bersih dan aman.

(NASRULLAH NARA)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



KOMPAS/BAMBANG SIGAP SUMANTRI

Perahu Nelayan — *Berbeda dengan nelayan di Pantai Utara Jawa yang rata-rata sudah menggunakan kapal motor, nelayan di Pantai Selatan Yogyakarta masih menggunakan perahu* mini fiber. *Perahu nelayan di Pantai Baron, misalnya, hanya ditopang mesin berkekuatan 5-12 tenaga kuda.*

PENGUNJUNG OBYEK-OBYEK WISATA PANTAI SELATAN YOGYA

OBYEK	1998/1999	1999/2000	2000	2001
Parangtritis	1.024.017	1.370.000	1.498.186	1.641.100
Samas	55.147	57.173	58.709	48.540
Pandansimo	35.094	39.990	58.990	67.234

* Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
**Catatan: Tiga obyek tersebut penerima wisatawan terbesar di Pantai Selatan Yogya.

TAUFAN

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : MINGGU / 18 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 22 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SANTOSA, DWI Andreas
Subjek / HO. CLASS : POLITIK / 338.9

Biopolitik dan Pangan Transgenik

BUDI Widianarko dalam *Kompas* 11 April 2002 menulis: "Dari segi teknologi, memperhadapkan keberadaan kontaminan transgenik dalam sistem pangan kita dengan kontaminan pangan yang sering menjadi ganjalan ekspor produk pangan kita ke negara maju, bagaikan memperhadapkan 'gajah' dengan 'kutu'. Tingkat kerumitan dan kesulitan untuk mendeteksi unsur transgenik dalam pangan berlipat-lipat dibandingkan kontaminan pangan konvensional. Inilah paradoks globalisasi pangan."

Nuansa pangan transgenik tidak hanya sekadar masalah kemampuan deteksi ataupun kemampuan menguji apakah pangan tersebut aman atau tidak aman. Pada suatu pertemuan di Bangkok, Januari 2001, direktur bioteknologi Monsanto, St Louis, AS, menyatakan kepada penulis bahwa mengenai isu transgenik sebaiknya pembahasan lebih dipusatkan ke hubungan MNC dengan pemerintah/rakyat/petani.

Di satu sisi, penulis membenarkan pernyataan tersebut karena transgenik sangat erat terkait dengan perdagangan internasional, globalisasi dan biopolitik.

Biopolitik

Biopolitik merupakan istilah baru yang didefinisikan sebagai politisasi isu-isu bioteknologi modern di dalam kerangka arus besar politik (*political stream*) yang mempengaruhi kebijakan publik pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Elemen-elemen dari *political stream* meliputi: 1) persepsi nasional yang terdiri dari opini masyarakat, iklim opini, dan media massa; 2) kekuatan politik yang terorganisasi yaitu partai-partai politik, kelompok penekan, dan kelompok pelobi; 3) pembangunan konsensus yang terdiri dari *band-wagons* dan tawar-menawar; 4) pemerintah yang meliputi perubahan kekuasaan, pemilihan umum, dan perubahan personalia di pemerintahan.

Sebagian besar tulisan dan seminar di Indonesia hanya mengungkap tataran teknis dari tanaman/pangan transgenik. Hal tersebut menyebabkan debat menjadi berkepanjangan dengan hanya mengulas aman tidaknya pangan transgenik, risiko terhadap lingkungan, serta dampak jangka panjang tanaman/pangan transgenik.

Keberhasilan komersialisasi produk transgenik terkait dengan kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang "*acceptable*" dalam ranah sosio politik, dan ini sangat disadari oleh Perusahaan Multi Nasional (MNC, Multinational Corporation). Pendekatan tersebut sangat berhasil dengan penambahan jumlah luasan tanaman transgenik yang fantastis (lihat Gambar 1).

Sebesar 46% kedelai yang saat ini ditanam di dunia merupakan kedelai transgenik, sedangkan kapas, kanola, dan jagung, berturut-turut sebesar 20%, 11%, dan 7%. Bila kecenderungan ini terus berlanjut maka dalam lima tahun lagi akan terdapat 157 juta hektar tanaman transgenik atau 62% dari seluruh luasan empat tanaman penting tersebut.

Penekan vs MNC

Keluarnya berbagai peraturan yang sangat membatasi komersialisasi tanaman transgenik di Uni Eropa, terkait dengan biopolitik. (baca: Morris and Adley, 2000, *Evolving European GM Regulation: an example of biopolitics at work*, Tibtech 18:325-328, Morris and Adley, 2001, *Trends in Biotech.* 19:43-48)

Peraturan ketat tersebut diakibatkan kuatnya kelompok penekan yang terdiri dari partai-partai hijau dan NGO, opini massa yang cenderung menolak transgenik, ketidaksetujuan banyak ilmuwan Eropa terhadap paten kehidupan, monopoli oleh MNC, dan upaya perlindungan petani Eropa yang "*over subsidized*".

Akibat kasus kupu-kupu Monarch, empat produk transgenik yang menunggu untuk disetujui, dihentikan sementara oleh Komisi Eropa tahun 1999. Pada saat hampir bersamaan keluar kajian Arphads Pusztai yang digunakan oleh banyak partai untuk bahan kampanye (kebetulan bersamaan dengan pemilihan parlemen di hampir seluruh anggota Uni Eropa).

Nuansa biopolitik juga sangat kental ketika Perancis mendesak perlunya moratorium terhadap organisme transgenik, serta Parlemen Eropa memutuskan penolakan pangan transgenik yang menggunakan *marker* gen resisten antibiotik yang akan berlaku efektif pada tahun 2005.

Kasus kupu-kupu Monarch dan penelitian Pusztai juga menyebabkan berbaliknya opini publik, yang semula mendukung bioteknologi kemudian menjadi menolak (Eurobarometer 1991, 1993, 1996, 1999) yang mengakibatkan melambatnya penambahan luas areal transgenik pada tahun 2000. Berbagai tulisan yang kemudian muncul untuk menyanggah hasil penelitian Cornell University (kupu-kupu Monarch) dan Pusztai, mengubah lagi opini sehingga penambahan areal tanaman transgenik meningkat tahun 2001.

Dari berbagai kajian biopolitik, terbukti ilmuwan menempati urutan tertinggi sebagai pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat dan memiliki pengaruh besar dalam penentuan kebijakan publik. Sedang perusahaan menempati urutan terendah.

MNC memahami itu dan dengan menggunakan kekuatannya mempengaruhi dan membentuk opini yang berkembang, terutama di kalangan ilmuwan dan penentu kebijakan, di masyarakat, lembaga-lembaga internasional, serta negara-negara yang menjadi sasaran komersialisasi produk mereka.

Berbagai lembaga dibentuk (semisal ISAAA, *International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications*) yang sangat gencar mempromosikan tanaman transgenik. Berbagai riset, seminar, *workshop*, dan pertemuan ilmiah diadakan dan didanai oleh MNC. Ilmuwan kemudian secara tidak langsung menjadi humas yang sangat efektif bagi MNC.

ontroversi kepentingan

Dalam biopolitik kalimat ng seringkali dikemukakan lalah "Transgenik sangat enguntungkan negara berembang dan petani toh bebas emilih apa yang akan ditanam".

Namun kata-kata bebas memilih menjadi tidak bermakna, ketika varitas tanaman yang dikembangkan oleh lembaga publik dengan dana 40 juta rupiah disandingkan dengan varitas yang dihasilkan oleh MNC dengan dana ratusan milyar hingga beberapa trilyun rupiah.

Persoalan tanaman/pangan transgenik menjadi amat serius di masa depan, bila perhitungan penulis benar bahwa tanaman transgenik akan menguasai 62% dari empat tanaman utama di dunia. Karena hal itu berarti juga pengalihan penguasaan benih dari milyar-
petani dan lembaga-lembaga [redacted]. (li-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : .....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

hat tabel)

Semoga saja ke depan kebijakan-kebijakan nasional maupun internasional lebih mengedepankan kepentingan publik. Hampir seluruh *tool* untuk merakit tanaman transgenik saat ini dimiliki dan dipatenkan oleh MNC yan[redacted] nyebabkan upaya pe[redacted] bangan tanaman tran[redacted] oleh lembaga publik mengalami kesulitan besar.

Perjanjian yang adil d[redacted] MNC perlu dilakukan s[redacted] ga nantinya tanaman/p[redacted] transgenik benar-benar menguntungkan negara berkembang.

DWI ANDREAS SANTOSA
Doktor biologi molekuler, Fakultas Pertanian IPB. S[redacted] melakukan riset kerja sama di Center for Molecular Biology, BGE, Jerman.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 19 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 4-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : PENGHASILAN NEGARA / 3303

PDB Triwulan I Tumbuh 2,6 Persen

Jakarta, Kompas

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam triwulan pertama tahun 2001, sebesar 2,6 persen dari triwulan keempat tahun 2000. Dibandingkan dengan PDB triwulan I tahun 2000, PDB triwulan I tahun 2001 ini tumbuh 4,01 persen. Akan tetapi, pertumbuhan PDB ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2000 yang tercatat sebesar 4,77 persen.

PDB triwulan I tahun 2001 ini bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya menunjukkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim. Sektor pertanian menyumbangkan peningkatan paling besar, 15,39 persen. "Sektor produksi meningkat pesat karena musim panen tanaman pangan yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2001 ini," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Soedarti Surbakti, di Jakarta, Jumat (18/5).

Pertumbuhan pada triwulan pertama ini terjadi pada hampir semua sektor kecuali sektor listrik, gas, air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Penurunan produksi sektor listrik ini minus 2,79 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan penurunan sektor perdagangan, hotel, dan restoran minus 0,02 persen. **(lihat tabel)**

Kenaikan di sektor pertanian disebabkan kenaikan subsektor tanaman bahan makanan sebesar 60,45 persen dan subsektor peternakan sebesar 2,2 persen. Sementara itu, tiga subsektor lainnya menurun, yaitu subsektor tanaman perkebunan minus 34,40 persen, subsektor perikanan minus 16,18 persen dan subsektor kehutanan minus 1,79 persen.

Kusmadi Saleh, Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS menambahkan, secara empiris BPS menemukan bahwa pada triwulan kedua biasanya terjadi penurunan PDB. "Biasanya memang demikian pola yang terjadi," ujarnya.

Menurut Kusmadi, pendapatan per kapita penduduk Indonesia dalam rupiah pada triwulan I tahun 2001 ini sebesar Rp 1,73 juta dan pada triwulan IV tahun 2000 sebesar Rp 1,49 juta. "Namun perlu diingat, nilai tukar rupiah pada tahun 2000 lalu sekitar Rp 7.300 per dollar AS. Sekarang sudah Rp 9.000-an per dollar. Bisa diperhitungkan pendapatan per kapita ini dalam dollar AS," lanjut Kusmadi.

Nilai PDB

Untuk mengetahui nilai PDB, dihitung dengan dua cara yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Perhitungan berdasarkan harga berlaku, yaitu harga yang berlaku pada saat PDB dihitung serta harga konstan tahun 1993, yaitu harga patokan yang dibuat pada tahun 1993.

Atas dasar harga berlaku, nilai PDB triwulan IV tahun 2000 mencapai Rp 337,9 trilyun dan pada triwulan I tahun 2001 meningkat menjadi Rp 355,4 trilyun. Nilai PDB atas dasar harga konstan tahun 1993, PDB triwulan IV tahun 2000 sebesar Rp 99,9 trilyun dan pada triwulan I tahun 2001 seharga Rp 102,5 trilyun.

Atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan bruto paling besar pada triwulan I tahun 2001 adalah sektor industri. Sektor ini membukukan nilai PDB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 92,7 trilyun, disusul sektor pertanian sebesar Rp 61,0 trilyun, dan sektor perdagangan sebesar Rp 52 trilyun. Produksi sektor pertambangan sebesar Rp 49,1 trilyun dan sektor jasa-jasa sebesar Rp 30,8 trilyun.

Sedangkan nilai PDB berdasarkan harga konstan tahun 1993, nilai industri pengolahan sebesar Rp 27,2 trilyun, pertanian Rp 17,6 trilyun, perdagangan, hotel dan restoran Rp 16,3 trilyun, pertambangan Rp 9,6 trilyun, dan jasa-jasa sebesar Rp 9,5 trilyun.

Jenis penggunaan

Dilihat dari jenis penggunaan atau permintaan, PDB pada triwulan I tahun 2001 digerakkan oleh semua komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal atau investasi, serta ekspor dan impor.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga riil atas dasar harga konstan tahun 1993, meningkat 1,3 persen pada triwulan I tahun 2001 dibandingkan triwulan IV tahun 2000. Pada triwulan I tahun 2001, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp 72,5 trilyun sedangkan pada triwulan IV tahun 2000 sebesar Rp 71,8 trilyun. Berdasarkan harga berlaku, pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 3,39 persen dari Rp 229,5 trilyun pada triwulan IV tahun 2000 menjadi Rp 237,3 trilyun pada triwulan I tahun 2001.

Sebaliknya, pada sisi pengeluaran konsumsi pemerintah terdapat penurunan. Pengeluaran konsumsi pemerintah menurun dari triwulan IV tahun 2000 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2001. Besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku turun sebesar 1,21 persen dari Rp 24,1 trilyun menjadi Rp 23,8 trilyun pada triwulan I tahun 2001. **(joe)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

LAJU PERTUMBUHAN PDB

Menurut Lapangan Usaha
(Persentase)

Lapangan Usaha	Triwulan IV 2000 terhadap Triwulan III 2000	Triwulan I 2001 terhadap Triwulan IV 2000	Triwulan I 2001 terhadap Triwulan I 2000
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	-12,55	15,39	2,27
2 Pertambangan dan Penggalian	2,19	0,10	2,95
3 Industri Pengolahan	2,50	0,61	5,92
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	2,46	-2,79	7,01
5 Bangunan	0,67	0,42	1,23
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,53	-0,02	5,00
7 Pengangkutan dan Komunikasi	3,17	0,87	6,88
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,80	0,32	2,94
9 Jasa-jasa	-0,12	0,08	1,24
PDB	**-0,72**	**2,60**	**4,01**
PDB Tanpa Migas	**-0,87**	**2,81**	**4,46**

Sumber: BPS